

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisa data yang telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah pada daerah Kota dan Kabupaten se Provinsi Lampung, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil estimasi bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah pada masing-masing kabupaten/kota. Peranan PAD dalam membiayai pengeluaran pemerintah pada masing-masing daerah yang mana pengeluaran tersebut terdiri dari belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik. Yang mana setiap kenaikan 1% PAD akan menyebabkan pengeluaran pemerintah pada masing-masing daerah bertambah sebesar 0,26%.
2. Variabel independen Dana Perimbangan secara signifikan berpengaruh terhadap variabel pengeluaran pemerintah di Kota dan Kabupaten se Provinsi Lampung. Dengan kata lain Dana Perimbangan mampu mempengaruhi pengeluaran pemerintah masing-masing daerah secara positif. Kenaikan 1% Dana Perimbangan yang diberikan pemerintah pusat pada pemerintah daerah Kota dan Kabupaten se Provinsi Lampung akan menyebabkan kenaikan pengeluaran pemerintah di masing-masing daerah sebesar 0,22%. Hal ini berarti Daerah masih tergantung dengan transfer dana dari Pemerintah pusat

dalam membiayai pengeluaran pemerintah disetiap Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

3. Jumlah Penduduk mampu mempengaruhi pengeluaran pemerintah masing-masing daerah secara positif, hal ini sesuai dengan hipotesis. Kenaikan 1% Jumlah Penduduk pada setiap pemerintah daerah Kota dan Kabupaten se Provinsi Lampung akan menyebabkan kenaikan pengeluaran pemerintah di masing-masing daerah sebesar 4,64%. Pertumbuhan penduduk yang pesat akan menaikkan pengeluaran pemerintah, ini disebabkan pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana seperti : sarana transportasi, kesehatan, pendidikan dan lain-lain.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah otonom kabupaten/kota di Provinsi Lampung dalam menyusun dan merealisasikan APBD perlu memperhatikan rasio dan trend kemandirian dan efektivitas keuangan daerah.
2. Penetapan besaran kebutuhan dana perimbangan dari pusat hendaknya disertai dengan peningkatan PAD.
3. Pemerintah daerah otonom kabupaten/kota di Provinsi Lampung dalam menyusun dan realisasi pendapatan dan belanja daerah perlu juga memperhatikan arah perkembangan pola hubungan dan kemampuan keuangan daerahnya agar menunjukkan kondisi yang lebih baik.

4. Masalah kependudukan yang meliputi jumlah, komposisi dan distribusi penduduk merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi, tetapi dapat pula menjadi beban dalam proses pembangunan jika berkualitas rendah.

Dan dari penelitian ini juga diharapkan agar otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga suatu daerah benar-benar dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Dengan penelitian diatas, dapat diketahui bahwa besarnya Belanja daerah lebih banyak dipengaruhi oleh jumlah Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat, hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi. Jika hal ini masih terus berlanjut maka dikhawatirkan pelaksanaan otonomi daerah akan terhambat.